

Implementasi Prinsip *Agile Governance* Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat

Farhan Rahmawan Halim^{1*}, Feni Astuti², Khaerul Umam³

¹ Admininstrasi Publik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

² Admininstrasi Publik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

³ Admininstrasi Publik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

Abstract

The research was conducted with the aim to learn about the implementation of the 3 (three) agile governance principles during the Covid-19 pandemic at the West Java Provincial Government through the application of the Pikobar application. Agile governance is expected to organize governance faster in the face of various challenges and dynamic environmental conditions. Researchers used qualitative research with the study of literature. Researchers traced a variety of secondary data sources which were then processed to be described as literature studies. Researchers conducted data analysis in accordance with the theory of agile governance proposed by Luna et al, (2015). The researcher focused the research on 3 (three) principles of agile governance. The results showed that the implementation of agile governance in the West Java provincial government did not support the maximum. This application still needs to be improved Pikobar Application. Reviewing the results of an analysis of the principle of agility of governance which is expected to be one of the efforts to improve services to the community and provide convenience in relation to the future in the health sector as it is today.

Keywords: *agile governance, public service, pikobar aplication*

Abstrak

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari 3 (tiga) prinsip *agile governance* di masa pandemi Covid-19 pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat melalui peluncuran aplikasi Pikobar. Implementasi *agile governance* diharapkan dapat menjadikan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat tanggap dalam menghadapi berbagai tantangan dan kondisi lingkungan yang dinamis. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber data sekunder yang kemudian diolah untuk di deskripsikan kedalam bentuk studi literatur. Peneliti melakukan analisis data yang didasarkan pada teori *agile governance* yang dikemukakan oleh Luna et al, (2015). Peneliti memfokuskan penelitian pada 3 (tiga) prinsip *agile governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *agile governance* pada pemerintah provinsi Jawa Barat dinilai belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih perlu adanya perbaikan pada Aplikasi Pikobar. Sehingga dengan adanya hasil analisis terhadap prinsip *agile governance* tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan kemudahan meskipun tengah berada di masa krisis kesehatan seperti saat ini.

Kata Kunci: *agile governance, pelayanan publik, aplikasi pikobar*

* farhan.rh@uinsgd.ac.id

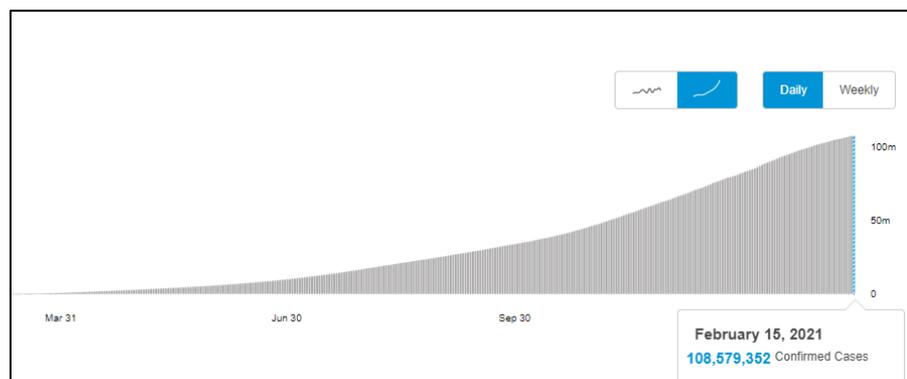
PENDAHULUAN

Indonesia bahkan dunia tengah digemparkan dengan hadirnya sebuah virus corona yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh manusia terutama pada pernafasan. WHO menjelaskan bahwa Corona merupakan virus yang bisa muncul tidak hanya pada manusia, bahkan pada hewan sekalipun. Corona yang merupakan keluarga besar virus, jika menghinggap tubuh manusia maka akan menyebabkan infeksi pernapasan seperti flu biasa bahkan lebih parahnya dapat menyebabkan penyakit seperti *Middle East Respiratory Syndrom* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Kota Wuhan di negara China menjadi tempat pertama kali ditemukannya orang yang terpapar Virus Covid-19 tepat pada bulan Desember tahun 2019 lalu (Hanoatubun, 2020).

Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai sebuah pandemi oleh *World Health*

Organization (WHO) ini merupakan sebuah penyakit menular. WHO menjelaskan bahwa gejala paling umum yang disebabkan oleh Covid-19 ini meliputi demam, batuk kering, dan rasa kelelahan. Bukan hanya itu, pasien juga dapat mengalami beberapa gejala yang sifatnya ringan dan muncul secara bertahap. Gejala yang dapat muncul seperti hidung yang tersumbat, tenggorokan yang terasa sakit, rasa nyeri pada kepala, bahkan bisa kehilangan indera perasa atau indera penciuman. Gejala lain yang tampak antara lain terdapat beberapa perubahan pada warna jari tangan ataupun kaki (Moudy and Syakurah, 2020).

Dengan gejala yang muncul serta penyebaran yang terbilang mudah menyebar, maka sebaran Covid-19 di dunia terhitung cepat. Sejak awal kemunculan Covid-19 sampai pada 15 Februari 2021, data sebaran virus Covid-19 terus meningkat. Hal ini dibuktikan pada grafik berikut.



Gambar 1.
Grafik Sebaran Virus Covid-19 di Dunia per 15 Februari 2021
Sumber : (World Health Organization, 2021)

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan terus mengalami peningkatan kasus Covid-19. Hingga 15 Februari 2021 penyebaran Covid-19 sudah tersebar di 223 Negara dengan jumlah terkonfirmasi positif 108.579.352 kasus. Lebih lanjut, negara-negara dengan sebaran terbanyak di dunia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
Data Sebaran Virus Covid-19 di Dunia per 15 Februari 2021

No.	Nama Negara	Terkonfirmasi Positif	Terkonfirmasi Meninggal
Sebaran di Seluruh Dunia		108.579.352	2.396.408
1.	Amerika Serikat	27.309.593	498.464
2.	India	10.916.589	155.732
3.	Brazil	9.809.754	238.532
4.	Russia	4.086.090	80.520
5.	Inggris	4.038.082	117.166
.			
19.	Indonesia	1.223.930	33.367

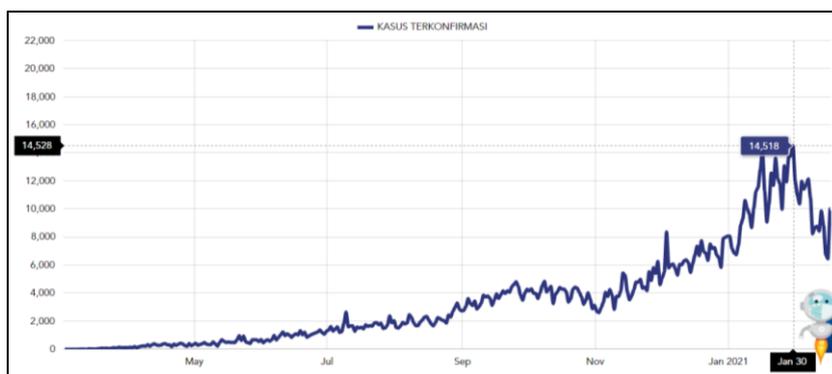
Sumber : *Word Health Organization* yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, negara dengan kasus Covid-19 terbanyak yaitu Negara Amerika Serikat (USA) dengan jumlah kasus sebanyak 27.309.503 kasus. Kemudian diikuti oleh Negara India dengan 10.916.589 kasus, dan diperingkat ketiga yaitu Negara Brazil dengan jumlah 9.809.754 kasus. Sedangkan negara Indonesia menempati posisi ke-19 dari 233 Negara di dunia yang terdampak virus Covid-19 ini. Dengan angka sebaran yang dapat dikatakan banyak ini, tentunya Indonesia wajib melakukan kesiapsiagaan untuk menekan angka penyebaran covid-19. Hal ini sejalan dengan pendapat (Suni, 2020) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia ini wajib siapsiaga terhadap potensi yang muncul dalam penyebaran Covid-19. Hal ini dikarenakan

letak geografis negara Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara yang terdampak dalam penyebaran virus serta perkembangan globalisasi dan semakin lancarnya lalu lintas antarnegara.

Dilihat dari total populasi Indonesia sebanyak 273,618,818 jiwa, total kasus positif Covid-19 mencapai 1.223.930 kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan kasus meninggal sebanyak 33.367 kasus dan kasus. Sejak awal kemunculannya di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020 hingga pada tanggal 15 Februari 2021, jumlah pasien positif corona terus mengalami peningkatan.

Berikut ini merupakan grafik yang dapat menunjukkan jumlah peningkatan kasus terkonfirmasi di indonesia:



Gambar 2.
Grafik Peningkatan Jumlah Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia

Sumber: www.covid19.go.id

Dilihat dari grafik di atas, kasus tertinggi terjadi pada tanggal 30 Januari 2021 dengan total kasus sebanyak 14.518 kasus. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penambahan kasus tertinggi dengan jumlah 4.601 kasus, disusul oleh DKI Jakarta dengan jumlah 3.491 kasus, serta provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 1.237 kasus (Oktaviani Alam, 2021). Semakin banyaknya penambahan kasus di Indonesia tentunya sangat berdampak bagi krisis kesehatan di Indonesia.

Dengan dihadapkan pada krisis Kesehatan yang tengah dihadapi oleh Indonesia, menuntut pemerintah untuk merespon dengan cepat dan tepat. Peran pemerintah Indonesia sangat penting untuk memutus penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Jika pemerintah tidak cepat menanggapi hal tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa Negara Indonesia

akan menghadapi situasi yang lebih buruk lagi karena cepatnya virus menyebar. Di tengah ketidakpastian dan situasi krisis ini, maka pemerintah memegang peranan penting untuk merespon, mengelola, sampai membuat keputusan yang sesuai dengan perubahan kondisi yang terjadi di negaranya. Respon yang cepat dan tepat harus diberikan oleh sebuah organisasi, hal tersebut dikarenakan semakin lama organisasi bertindak maka akan mengalami tantangan dan perubahan lingkungan lainnya (Lusch, Vargo and Tanniru, 2009). Maka *Agile Governance* sangat diperlukan dalam menghadapi krisis kesehatan di masa pandemi ini.

Bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah pun dituntut untuk menerapkan tata kelola pemerintah yang *agile*. Adapun jika dilihat berdasarkan jumlah kasus terbanyak pada provinsi di Indonesia yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.
Data Sebaran Virus Covid-19 di Indoneisa per 15 Februari 2021

No.	Nama Provinsi	Terkonfirmasi Positif
Sebaran di Seluruh Indonesia		1.223.930
1.	DKI Jakarta	317.432
2.	Jawa Barat	175.950
3.	Jawa Tengah	142.318
4.	Jawa Timur	122.807
5.	Sulawesi Selatan	52.640

Sumber : data *covid19.go.id* yang diolah

Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui *website covid19.go.id*, hingga tanggal 15 Februari 2021 kasus terkonfirmasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ke-2 di Indonesia. Kasus yang terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat mencapai 175.950 kasus dengan rincian pasien meninggal sebanyak 2.118 pasien, sembuh sebanyak 148.816 pasien dan pasien dalam perawatan atau isolasi mandiri sebanyak 25.016 pasien (*Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat, 2020*).

Menanggapi hal tersebut, maka pemerintah harus melakukan pengawasan secara cepat dan tepat. Maka untuk melakukan pengawasan terkait penyebaran virus Covid-19 di Provinsi Jawa Barat serta memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat suatu aplikasi yang

dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui penyebaran kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Barat.

Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 atau yang dikenal dengan Pikobar merupakan suatu aplikasi yang dibuat secara khusus oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk digunakan oleh warganya. Masyarakat dapat mengunduh aplikasi tersebut melalui *smartphone* yang dimilikinya ataupun melalui *website pikobar.jabarprov.go.id*. Melalui aplikasi Pikobar ini, pemerintah memberikan informasi lengkap seputar perkembangan kasus Covid-19 di Jawa Barat. Bukan hanya itu, pemerintah juga memberikan beragam edukasi sebagai langkah preventif yang dapat dibaca langsung oleh masyarakat. Pemerintah juga memberikan informasi rumah sakit dan *call center* yang dapat dihubungi oleh pasien yang mengalami gejala-gejala Covid-19, agar

pasien tidak datang ke rumah sakit rujukan menggunakan kendaraan umum yang justru akan menjadi salah satu penyebab meluasnya virus melalui fasilitas umum yang dilaluinya. Pemerintah juga menghadirkan informasi yang *up to date* setiap harinya.

Diluncurkannya aplikasi Pikobar ini merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjadikan tata kelola pemerintahan yang *agile* (*Agile Governance*) di tengah kondisi lingkungan yang dinamis ini. Pemberlakuan PSBB dan *Work From Home* menuntut pemerintah untuk semakin *flexible* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mencapai *Agile Governance* di era *new normal* ini, maka pemerintah dituntut untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai upaya yang dapat dijadikan penghubung antara pemerintah dengan masyarakatnya. Pemanfaatan TIK dalam pemerintahan yang *agile*, akan memudahkan pemerintah untuk lebih gesit untuk menghadapi tantangan-tantangan saat ini dan masa yang akan datang dari perubahan lingkungannya.

Dalam lingkungan yang dinamis seperti pada masa pandemi ini, suatu negara memerlukan pemerintahan yang dinamis pula atau *dynamic governance*. Artinya, pemerintah mampu menyesuaikan

keputusan atau kebijakannya berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungannya (Lela Mazidah *et al.*, 2019). Begitupun dengan *agile governance* dalam menghadapi situasi krisis kesehatan yang disebabkan oleh menyebarnya virus covid-19 di Indonesia, menuntut pemerintah untuk merespon secara cepat terhadap segala perubahan yang terjadi di negaranya. Luna, Kruchten, dan Moura (2015) mendefinisikan *agile governance* sebagai berikut:

“Agile government is the ability of human societies to sense, adapt and respond rapidly and sustainably to changes in its environment, by means of the coordinated combination of agile and lean capabilities with governance capabilities, in order to deliver value faster, better, and cheaper to their core business”. (Luna, Kruchten and de Moura, 2015)

Ahli lain juga mendefinisikan *agile governance* yaitu kemampuan suatu organisasi dalam hal mengefisienkan anggaran dan membaca adanya peluang dengan cepat dan tepat sehingga muncul suatu tindakan yang kompetitif juga inovatif (Huang, Pan and Ouyang, 2014).

Maka dapat disimpulkan bahwa pada konsep *agile governance* ini pemerintah dituntut untuk gesit dalam menghadapi perkembangan yang ada dan tidak terduga. Sehingga dalam menghadapi berbagai

situasi yang sedang ataupun akan terjadi, pemerintah mampu menyesuaikan dan mengambil suatu tindakan yang tepat dan inovatif sesuai dengan perubahan atau situasi yang terjadi di negaranya.

Prinsip merupakan salah satu hal terpenting dalam tata kelola pemerintahan yang *agile*. Luna, Kruchten, dan Moura (2015) mengemukakan enam prinsip *agile governance*, antara lain:

1. *Good enough governance*, berarti latar dari organisasi harus selalu diperhatikan dan menjadi acuan dalam sebuah tingkat tata kelola.
2. *Business-driven*, berarti dalam setiap keputusan, yang harus tetap menjadi pertimbangan adalah bisnis.
3. *Human focused*, artinya perlu adanya ruang dalam tata kelola pemerintahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan tentunya perlu dihargai setiap masukan yang ada.
4. *Based on quick wins*, artinya suatu kesuksesan yang sudah dicapai dengan cepat harus dijadikan dorongan yang lebih, guna mendapat capaian yang lebih baik dari sebelumnya.
5. *Systematic and adaptive approach*, pada perubahan yang cepat serta sistematis diperlukan suatu tim yang bisa memperluas kemampuan mereka khususnya kemampuan intrinsik yang dimilikinya.

6. *Simple design and continuous refinement*, kemampuan tim dalam membuat desain yang sederhana dan diharuskan memberikan capaian yang cepat serta harus tetap meningkat.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) prinsip *agile governance* yang dikemukakan oleh Luna, Krutchen, dan Moura dalam (Vernanda, 2019) yaitu *Based on quick wins*, *Systematic and adaptive approach*, dan *Simple design and continuous refinement* untuk menganalisis implementasi *agile governance* pada aplikasi Pikobar di Provinsi Jawa Barat. Peneliti menjadikan tiga prinsip *agile governance* tersebut sebagai pisau analisis dengan pertimbangan bahwa ketiga prinsip tersebut dinilai peneliti lebih relevan dengan apa yang diupayakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu dalam melakukan pengawasan terkait penyebaran virus Covid-19 di Jawa Barat serta memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui suatu aplikasi yaitu aplikasi Pikobar.

Peneliti menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono, dkk yang berjudul *The Influence of Pikobar Application in Suppressing the Rate of Coronavirus Spread The Influence of Pikobar Application in Suppressing the Rate of Coronavirus Spread* sebagai

penelitian terdahulu. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metode TAM (*Technology Acceptance Model*) untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna aplikasi Pikobar tersebut. Peneliti memperoleh data dari hasil survey yang dilakukan kepada penduduk Indonesia. Sedangkan hasil survey diolah dengan menggunakan *Smart PLS*. Hasil menunjukkan bahwa pengguna aplikasi merasakan berbagai kemudahan dalam menggunakan Pikobar. Kemudahan yang ada dalam setiap fiturnya membuat pengguna nyaman dan tujuan aplikasi Pikobar pun tercapai yakni mengurangi laju penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Wicaksono, 2020).

Peneliti juga menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Marijn Janssen dan Haiko Van Der Voort yang berjudul *Agile and adaptive governance in crisis response : Lessons from the COVID-19 pandemic* sebagai penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi atau mengetahui bagaimana suatu pemerintahan dalam menanggapi pandemi Covid-19 di negaranya dengan lincah (*agile*) dan kecepatan dalam memberikan respon pada situasi krisis ini. Yang dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap Pemerintah Netherland. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pemerintahan yang *agile* dan adaptif khususnya pada masa pandemi ini memerlukan toleransi yang tinggi, analisis yang cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan, memerlukan mekanisme sentralisasi dan desentralisasi, inovasi dan birokrasi, serta sains dan politik. Sehingga dalam menanggapi pandemi Covid-19 ini pemerintah perlu menggabungkan sistem tata kelola yang lebih luas yakni dengan melibatkan sektor-sektor non pemerintahan guna untuk memberikan respon berupa penanganan-penanganan dengan lebih cepat (Janssen and Voort, 2020).

Adapun *novelty* atau yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sehingga menjadi kelebihan dari penelitian ini adalah peneliti menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *agile governance* untuk melakukan analisis terhadap aplikasi Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana respon Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi keadaan darurat kesehatan ini. Penelitian ini juga menunjukkan kecepatan tanggapan pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Barat.

METODE

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai implementasi *agile governance* pada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Peneliti juga menganalisis temuan data yang diperoleh dari Website Pikobar (<https://pikobar.jabarprov.go.id/>), dengan rentang waktu data yang digunakan dari bulan juli 2020 sampai bulan februari 2021, yang selanjutnya dielaborasi dengan data-data sekunder baik dari *play store*, media sosial, ataupun media berita lainnya. Teknik pengumpulan data tersebut senada dengan ungkapan dari Silalahi yang menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui penelusuran data-data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel atau berita, komentar, publikasi pemerintah (website), dan jurnal (Silalahi, 2017). Pengambilan data juga dilakukan dengan teknik purposive dan snowball, yang dimana pada penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Triangulasi data digunakan sebagai teknik pengolahan data, sedangkan *data condensation*, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan dalam melakukan analisis data (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

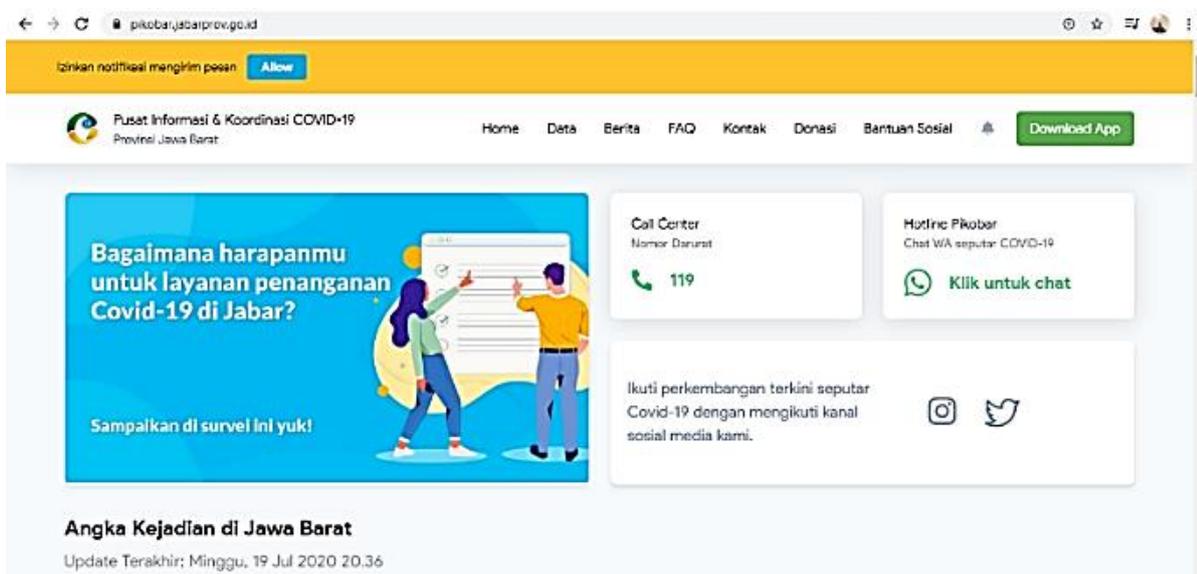
Implementasi merupakan suatu kegiatan yang mengarahkan pada penerapan sebuah program atau kebijakan yang telah dikaji sebelumnya. Hal tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Gordon dalam (Pasolong, 2014), berpendapat bahwa Implementasi mempunyai arti sebagai suatu kegiatan yang pada akhirnya mengarah kepada penerapan dalam suatu program. Begitupun dengan Ripley dan Franklin dalam Winarno (2006) yang memberikan pendapat bahwa implementasi merupakan suatu yang terjadi setelah ditetapkannya undang-undang sehingga memberikan otortas untuk membuat program, kebijakan, keuntungan, ataupun jenis keluaran lainnya yang nyata (Winarno, 2016).

Di masa pandemi seperti saat ini, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan cepat dan tepat, yang dimana untuk memenuhi hal tersebut tentu diperlukan sumber daya manusia yang cerdas, gesit, dan tangkas (Sagala *et al.*, 2021). Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bawa tata kelola pemerintahan yang *Agile (agile governance)* merupakan tata kelola pemerintahan yang tepat dan dibutuhkan pada masa ini.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berupaya untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang *agile* melalui inovasi Aplikasi Pikobar. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Saut Sagala yang menyatakan bahwa dalam konsep Pandemi Covid-19, terdapat urgensi bagi pemerintah untuk menerapkan *agile governance* dalam menanggapi ketidakpastian yang begitu besar (Sagala *et al.*, 2021).

Gambaran Umum Aplikasi PIKOBAR

Aplikasi Pikobar merupakan sebuah inovasi teknologi yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Fungsi dari aplikasi Pikobar adalah sebagaimana nama pada aplikasi ini yaitu sebagai pusat informasi Covid-19 bagi masyarakat di Jawa Barat. Selain dapat diakses melalui *smartphone*, aplikasi Pikobar juga dapat diakses melalui daring pada laman *website* <http://pikobar.jabarprov.go.id> (Solahudin *et al.*, 2020).



<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>

Gambar 3.
Tampilan Aplikasi PIKOBAR
Sumber: <http://pikobar.jabarprov.go.id>

Dalam keterangan yang tertera di *website* tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Pikobar Jawa Barat ini merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Unit Pelayanan Teknis, Pelayanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial atau *Jabar Digital Service* di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah

Provinsi Jawa Barat. Dalam aplikasi tersebut menampilkan berbagai informasi atau data yang berkaitan dengan perkembangan pandemi Covid-19 khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya aplikasi Pikobar ini masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait pandemi Covid-19 di

Jawa Barat baik melalui *gadget* ataupun *website*.

Adapun informasi yang dimaksud adalah seperti perkembangan jumlah kasus Covid-19 baik dalam tingka nasional, tingkat regional di Provinsi Jawa Barat, bahkan hingga tingkat lokal seperti kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, masyarakat juga dapat melihat informasi daftar pusat panggilan darurat dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, peta sebaran daerah yang terpapar Covid-19, serta grafik data mengenai perkembangan kasus Covid-19 (Anggara *et al.*, 2020).

Beberapa keunggulan yang dimiliki aplikasi Pikobar ini, yaitu: (1) Menjadi pusat terpercaya dan akurat mengenai informasi mengenai Covid-19 di Jawa Barat, serta meminimalisir adanya berita *hoax* yang beredar di masyarakat. (2) Aplikasi ini menyediakan fasilitas untuk nomor darurat dalam penanganan Covid-19 sebagai salah satu upaya penanganan dasar pada pasien yang merasakan adanya gejala Covid-19 pada dirinya. Masyarakat dapat menghubungi nomor darurat 119 atau 08112093306 jika dirasa memiliki gejala Covid-19 seperti yang tertera pada aplikasi tersebut. (3) Menampilkan informasi mengenai data-data Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) berdasarkan data resmi yang berasal dari pemerintah

daerah setempat. Selain itu, pada aplikasi Pikobar ini menampilkan informasi jumlah pasien yang positif Covid-19.(4) Menampilkan imbauan-imbauan berupa video maupun grafis untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Jawa Barat sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Hal ini dikemas secara *up to date* seperti sosialisasi protokoler kesehatan, informasi kesehatan maupun titik penyebaran Covid-19 di berbagai macam negara (Anggara *et al.*, 2020).

Bukan hanya itu, aplikasi Pikobar ini juga telah menorehkan prestasi yakni masuk kedalam Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Covid-19, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 246 Tahun 2020. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200828132601-25-540303/aplikasi-pikobar-masuk-daftar-top-inovasi-pelayanan-publik>).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 atau Pikobar ini merupakan terobosan yang memanfaatkan teknologi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna memberikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai Covid-19 di Jawa Barat.

Dengan adanya Pikobar ini, masyarakat yang dulunya sangat minim akan informasi terpercaya dan sering

termakan berita *hoax* yang beredar, kini bisa dengan leluasa mengakses secara *up to date* mengenai perkembangan Covid-19 dengan sumber yang terpercaya dan terpusat dengan waktu yang singkat. Dengan adanya terobosan ini menjadikan menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai Provinsi yang terdepan dalam penyediaan informasi yang terpusat secara langsung dan tentunya *up to date*.

Implementasi Prinsip Agile Governance

Untuk mengetahui sejauh mana tata kelola pemerintahan yang *agile* pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka peneliti melakukan analisis terhadap tiga prinsip *Agile Governance*, yang dikemukakan oleh Luna et al (2015), sebagai berikut:

Based On Quick Wins

Pada prinsip *based on quick wins* ini, peneliti melakukan penelitian terhadap beberapa aspek yang terdiri dari aspek kecepatan, ketepatan, dan kesuksesan pada aplikasi Pikobar dalam upayanya untuk memberikan informasi perihal penyebaran Covid-19 di Provinsi Jawa Barat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pasien yang pertama kali terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia adalah dua orang warga yang berdomisili di Depok, Jawa Barat. Hal tersebut diumumkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada hari Senin, 2

Maret 2020 yang bertempat di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam aspek kecepatan, peneliti menilai bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah cepat dalam menanggapi hal tersebut. Kecepatan pemerintah dapat dilihat dari diluncurkannya inovasi teknologi yaitu berbentuk aplikasi yang dinamakan Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar). Aplikasi tersebut diresmikan pada tanggal 20 Maret 2020, yang dimana peluncuran aplikasi tersebut dilakukan tepat 18 hari setelah diumumkannya pasien pertama yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia. Diluncurkannya aplikasi yang menjadi pusat informasi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat tersebut merupakan salah satu bentuk respon pemerintah dalam menanggapi kondisi yang terjadi, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan cepat. Juga sebagai salah satu langkah *preventif* bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar virus tidak menyebar lebih luas dan cepat.

Hal tersebut tentunya diapresiasi oleh Pemerintah Pusat atas kecepatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan inovasi untuk penanganan Covid-19 di Jawa Barat. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, “*Alhamdulillah, kami mendapat atensi yang luar biasa dari pemerintah pusat.*” Ucapnya saat Menanti

Aplikasi Pikobar, Pusat Informasi Covid-19 untuk Warga Jawa Barat, Selasa (18/3/2020).

(<https://www.liputan6.com/regional/read/4205631/menanti-aplikasi-pikobar-pusat-informasi-covid-19-untuk-warga-jawa-barat>).

Seperti yang telah peneliti uraikan dalam gambaran umum Aplikasi Pikobar sebelumnya, aplikasi Pikobar sangat memungkinkan masyarakat untuk dapat memperoleh informasi secara *up to date* dan mengetahui data penyebaran Covid-19 yang akurat dan lengkap. Dengan adanya informasi tersebut masyarakat dapat menggunakannya untuk meningkatkan kewaspadaannya dalam menanggapi Covid-19 ini. Bagi pemerintah, aplikasi ini dapat memudahkan pemerintah untuk memberikan informasi terkait perkembangan Covid-19 di setiap daerah yang ada di wilayah Jawa Barat dengan cepat. Adanya peta sebaran virus dalam aplikasi tersebut dapat memberikan kemudahan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan penanganan dengan cepat kepada warganya yang terinfeksi Covid-19.

Dalam aspek ketepatan, peneliti menilai bahwa pemerintah telah bertindak secara tepat dalam hal meluncurkan aplikasi tersebut. Ketepatan pemerintah dapat dilihat dari kondisi yang terjadi pada saat ini, yang dimana virus menyebar

begitu cepat. Penyebaran virus yang cepat dan tersebar di berbagai daerah membuat masyarakat merasa khawatir dan resah ketika hendak bepergian.

Dengan hadirnya aplikasi Pikobar, tentu dapat memudahkan masyarakat untuk melihat peta sebaran virus yang ada di berbagai daerah. Peta sebaran yang ada dalam fitur aplikasi dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan antisipasi ketika hendak bepergian ke berbagai daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, peneliti menilai bahwa aplikasi Pikobar dapat melawan hoax yang sering beredar di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat (Anggara *et al.*, 2020) yang menyatakan bahwa aplikasi Pikobar dapat menghindari penyebaran berita hoax mengenai Covid-19. Dengan adanya sebuah sistem di mana Pikobar ini bisa diakses dan dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat dengan informasi yang akurat dan bersumber resmi dari Pemerintah.

Pendapat lain yaitu menurut (Nurislaminingsih, 2020) yang menyebutkan bahwa keadaan berita yang tidak valid serta ketidakjelasan sumber mengenai Covid-19 ini dapat memunculkan kepanikan pada masyarakat. Terlebih kian hari, justru virus ini terus menelan korban jiwa. Mudahnya penyebaran informasi pada masyarakat membuat informasi yang valid terasa kabur

karena tertutup oleh informasi-informasi hasil editan orang yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, masyarakat sangat membutuhkan informasi yang valid mengenai Covid-19 ini.

Dengan demikian, dalam kondisi pandemi seperti ini keberadaan teknologi yang memuat informasi sangat diperlukan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pemerintah begitupun sebaliknya. Hadirnya aplikasi Pikobar dinilai tepat sebagai kebutuhan dari masyarakat Jawa Barat sendiri..

Dalam aspek kesuksesan, peneliti dapat menilai bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sukses dalam meluncurkan dan memanfaatkan aplikasi Pikobar ini. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terjadinya penurunan pada tingkat penyebaran Covid-19 di Jawa Barat. Terhitung pada tanggal 16 Februari 2021, data menunjukkan bahwa tidak ada jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 atau nol (0).

Penurunan jumlah pasien yang terkonfirmasi Covid-19 di Jawa Barat tentunya terjadi karena adanya peran yang begitu besar dari petugas kesehatan juga meningkatnya kewaspadaan pada masyarakat akan penyebaran Covid-19 ini. Sampai tanggal 16 Februari 2021 terhitung ada sekitar 500 ribu lebih pengguna *mobile* aplikasi Pikobar yang mengunduh melalui aplikasi *playstore* (berbasis android). Dengan banyaknya jumlah pengguna

Pikobar baik melalui *website* maupun melalui aplikasi *mobile*, secara tidak langsung telah meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat terhadap penyebaran Covid-19.

Kesuksesan lainnya dapat dibuktikan dengan aplikasi Pikobar ini yang berhasil menorehkan prestasi yakni masuk kedalam Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Covid-19, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 246 Tahun 2020 (<https://diskominfo.jabarprov.go.id/blog/78-3-Pikobar-Dapatkan-Penghargaan-Setiaji-Sampaikan-Ini>).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintah telah berhasil menerapkan prinsip *based on quick wins* dalam menjalankan aplikasi Pikobar. Maka keberhasilan yang telah diraih perlu dirayakan dan dijadikan motivasi untuk menghasilkan inovasi-inovasi lain yang lebih menarik di masa yang akan datang. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan Luna dalam (Vernanda and Negar, 2019) yang menyatakan bahwa setiap keberhasilan yang diraih dengan cepat harus dirayakan dan menjadi motivasi dalam mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Systematic And Adaptive Approach

Pada prinsip yang kedua ini, peneliti melakukan penelitian terhadap aspek sistematis dan aspek adaptif dalam aplikasi Pikobar. Seperti yang dikemukakan oleh Luna et al, (2015) yang menyatakan bahwa pada prinsip kedua ini suatu organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan arah atau tujuannya terhadap situasi atau kondisi yang sedang dialami.

Dalam aspek sistematis, peneliti dapat menilai bahwa aplikasi Pikobar ini belum dibuat secara sistematis. Hal tersebut dikarenakan kolom pencarian dalam aplikasi Pikobar tidak ditampilkan pada halaman awal. Dalam aplikasi tersebut, kolom pencarian sulit untuk ditemukan karena fitur search engine terdapat dalam fitur lain yang mengharuskan pengguna untuk masuk ke fitur yang lainnya jika ingin melakukan pencarian. Penempatan fitur pencarian yang demikian peneliti menilai hal tersebut cukup rumit, terutama apabila digunakan oleh warga yang tidak terlalu memahami penggunaan media sosial.

Artinya pengguna harus lebih teliti untuk mencari fitur tersebut. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam fitur pencarian “pertanyaan”. Keterbatasan tersebut dapat dilihat dari fitur tersebut yang dimana pengguna hanya dapat mencari pertanyaan-pertanyaan seputar pengertian Covid-19,

cara mencegah penularan Covid-19, gejala Covid-19, dan bahayanya Covid-19. Selain pertanyaan-pertanyaan tersebut pengguna tidak dapat mencari pertanyaan lain seputar pandemi Covid-19. Dengan adanya keterbatasan yang telah penulis paparkan di atas peneliti menilai bahwa hal itu terlalu sempit, karena masyarakat seringkali memiliki pertanyaan lain di luar empat pertanyaan tersebut.

Selain itu, fitur pengaduan pada aplikasi Pikobar ini dirasakan belum maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penilaian dari beberapa pengguna melalui aplikasi playstore. Mereka menyampaikan bahwa fitur pengaduan pada aplikasi Pikobar ini tidak dapat digunakan dengan baik. Pengguna yang ingin menyampaikan pengaduan akan dialihkan untuk melakukan pengaduan melalui aplikasi whatsapp, tetapi setelah di alihkan pada aplikasi whatsapp ternyata pengaduan tersebut dibalas oleh robot. Sehingga pengguna merasa tidak nyaman dan kecewa.

Selain itu, penyampaian pengaduan melalui form juga dianggap terlalu berbelit. Hal tersebut dikarenakan pengguna harus mengisi nomor KTP, KK, alamat lengkap dan nomor telepon, tetapi pengguna diminta kembali untuk mengunggah foto KTP dan KK padahal pada aplikasi tersebut tidak terdapat fitur kamera yang seringkali membuat

pengguna merasa kebingungan untuk mencari fitur kamera dan galeri dalam

aplikasi. Komentar tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.
Tampilan Rating dan Komentar Kritik untuk Aplikasi PIKOBAR Jawa Barat
Sumber: Aplikasi *mobile* PIKOBAR Jawa Barat

Pada prinsip adaptif, peneliti dapat menilai bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini adalah Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial atau *Jabar Digital Service* di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mampu beradaptasi dengan situasi darurat kesehatan seperti saat ini melalui peluncuran aplikasi Pikobar. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan peluncuran aplikasi Pikobar yang dibuat khusus untuk memberikan informasi dan edukasi terkait perkembangan virus Covid-19 di Jawa Barat. Dengan adanya hal itu, pemerintah membuat suatu inovasi yang mengutamakan pada adaptasi dibanding prediktif.

Diluncurkannya aplikasi Pikobar sebagai upaya adaptif yang dilakukan oleh

pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk melakukan berbagai penanganan. Karena pada situasi yang darurat seperti saat ini, kebijakan atau keputusan yang adaptif lebih diperlukan dibanding sesuatu yang sifatnya belum pasti. dengan situasi lingkungan yang dinamis, diperlukan inovasi yang mampu beradaptasi dengan kedinamisan lingkungannya.

Simple Design And Continuous Refinement

Prinsip ini lebih menitikberatkan kepada kemampuan tim dalam membuat desain yang sederhana dan diharuskan memberikan capaian yang cepat serta harus tetap meningkat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa aplikasi ini dikembangkan oleh *Jabar Digital Service*

atau Unit Pelayanan Teknis, Pelayanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial yang mana unit ini berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini menjadi

tantangan tersendiri bagi tim pengembang aplikasi Pikobar dalam penyajian tampilan yang sederhana, menarik, serta mudah dipahami oleh masyarakat luas.



Gambar 5.
Tampilan Aplikasi PIKOBAR pada Menu Penyajian Data
Sumber: <http://pikobar.jabarprov.go.id>

Jika dilihat pada tampilan di atas, tim pengembang aplikasi Pikobar ini menampilkan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Selain itu, dengan kombinasi warna yang ada membuat pengguna tidak jenuh dalam mengakses informasi mengenai penyebaran Covid-19 di Jawa Barat.

Dalam aplikasi ini juga terdapat sebuah grafik yang ditampilkan seperti grafik harian pasien terkonfirmasi Covid-19 di Jawa Barat secara konsisten terus ditampilkan dengan *up to date* setiap harinya. Grafik lain yang ditampilkan aplikasi Pikobar ini seperti grafik Angka

Harian ODP, Angka Harian PDP, dan data lain mengenai penyebaran Covid-19. Pengguna yang mengakses aplikasi ini, baik melalui laman *website* maupun *mobile* PIKOBAR Jawa Barat, dimanjakan oleh pengembang aplikasi ini dengan cara pengguna bisa leluasa memilih dan mencari informasi yang akurat mengenai penyebaran Covid-19.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah apakah aplikasi ini dikemas secara *continuous* sehingga pengguna aplikasi ini bisa mendapatkan informasi secara *up to date* atau tidak? Berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan

oleh Peneliti, dapat dilihat bahwa aplikasi Pikobar ini selalu memberikan informasi yang terbaru. Data yang ditampilkan pada aplikasi ini berasal dari sinkronisasi data dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di berbagai daerah Jawa Barat. Hal ini tentunya memuat data yang *valid* sehingga data yang ditampilkan oleh aplikasi ini akurat dan terpusat serta dapat meminimalisir adanya berita *hoax*.

Peneliti menilai bahwa dalam prinsip ini, tim pengembang aplikasi Pikobar mampu menunjukkan bahwa aplikasi ini didesain dengan cara yang menarik dan bisa dinikmati oleh pengguna. Selain itu, tim pengembang aplikasi untuk saat ini bisa dikatakan berhasil membubuhkan data yang akurat dan ditampilkan secara *continuous*. Pengembang aplikasi ini juga berhasil memilih desain yang sederhana dan mudah dimengerti, sehingga peneliti menilai bahwa mereka lebih memilih pekerjaan yang sederhana namun menghasilkan hasil yang memuaskan daripada harus memilih desain yang dianggap mewah namun tidak bisa dinikmati oleh seluruh pengguna.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa *agile governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang dilakukan dengan cepat dan tepat serta memanfaatkan Teknologi Informasi dan

Komunikasi dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Implementasi *agile governance* pada masa pandemi seperti ini merupakan salah satu hal yang sangat krusial. Terutama pada masa pemberlakuan *Work From Home* (WFH).

Dalam implementasi *agile governance* melalui aplikasi Pikobar yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, peneliti dapat menilai bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya melaksanakan tiga prinsip *agile governance*. Hal ini dikarenakan pada aplikasi Pikobar masih perlu adanya perbaikan seperti pada prinsip kedua dalam aspek sistematis.

Peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, antara lain:

1. Perbaikan fitur pengaduan

Perbaikan fitur pengaduan sangat diperlukan mengingat banyaknya masyarakat yang ingin mengajukan pengaduan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Covid-19. Fitur pengaduan yang sudah ada sebelumnya dinilai masih belum maksimal dikarenakan adanya pengalihan pengaduan ke aplikasi lain yaitu aplikasi *WhatsApp*. Sedangkan aplikasi Pikobar tersebut dibuat

sebagai salah satu upaya pemberian pelayanan satu pintu pada masyarakat.

2. Menambahkan kolom pencarian yang ditampilkan pada halaman awal

Menampilkan kolom pencarian di halaman awal sangat diperlukan oleh pengguna aplikasi Pikobar. Untuk saat ini, kolom pencarian yang ada dinilai peneliti masih belum maksimal karena pengguna harus teliti dan mencari kolom pencarian tersebut ke fitur yang lain. Hal tersebut dinilai cukup rumit, karena jika pengguna merupakan orang yang kurang memahami akan media sosial akan merasa kesulitan untuk menemukan kolom *search engine*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* di jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah memotivasi peneliti sekaligus memberikan pelatihan penulisan artikel ilmiah bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini. Selanjutnya, peneliti sampaikan banyak terimakasih kepada Tim Pengelola Jurnal KOLABORASI: Jurnal Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan sekaligus perbaikan kepada

tulisan peneliti, sehingga layak terbit dalam jurnal bereputasi nasional.

REFERENSI

- Anggara, S. *et al.* (2020) 'Inovasi Kebijakan Publik Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat'.
- Hanoatubun, S. (2020) 'Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia', *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), pp. 146–153.
- Huang, P. Y., Pan, S. L. and Ouyang, T. H. (2014) 'Developing information processing capability for operational agility: Implications from a Chinese manufacturer', *European Journal of Information Systems*, 23(4), pp. 462–480. doi: 10.1057/ejis.2014.4.
- Janssen, M. and Voort, H. Van Der (2020) 'Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID- 19 pandemic', *International Journal of Information Management*, 55(June), p. 102180. doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2020.102180.
- Lela Mazidah, A. *et al.* (2019) 'Analisis Dynamic Governance pada Program Layanan Layad Rawat di Dinas Kesehatan Kota Bandung', *Jurnal Spirit Publik*, 14, pp. 154–163. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Luna, A. J. H. de O., Kruchten, P. and de Moura, H. P. (2015) 'Agile Governance Theory', (May), p. 601. Available at: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/15494>.
- Lusch, R. F., Vargo, S. L. and Tanniru, M. (2009) 'Service, Values Network and Learning', *Journal of the Academy of Marketing Science*, pp. 19–31.
- Moudy, J. and Syakurah, R. A. (2020) 'Pengetahuan terkait usaha pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia', *Higeia*

- Journal of Public Health Research and Development*, 4(3), pp. 333–346.
- Nurislaminingsih, R. (2020) ‘Layanan Pengetahuan tentang COVID-19 di Lembaga Informasi’, *Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 4(1), p. 19. doi: 10.29240/tik.v4i1.1468.
- Oktaviani Alam, S. (2021) ‘Jabar Tembus 4 Ribu Kasus! Ini Sebaran 14.518 Kasus COVID-19 RI 30 Januari’, *detikHealth*. Available at: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5354875/jabar-tembus-4-ribu-kasus-ini-sebaran-14518-kasus-covid-19-ri-30-januari>.
- Pasolong, H. (2014) *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat* (2020) *Pikobar Jabar*. Available at: pikobar.jabarprov.go.id/ (Accessed: 16 January 2021).
- Sagala, S. *et al.* (2021) ‘COVID-19 in Indonesia: An Analysis of DKI Jakarta’s COVID-19 Pandemic Response and Its Governance During the New Normal Period’, 514(Icoship 2020), pp. 185–191. doi: 10.2991/assehr.k.210101.041.
- Silalahi, U. (2017) *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Solahudin, D. *et al.* (2020) ‘Analisis Kepemimpinan di Indonesia dalam Kerangka Tanggap-Darurat Covid-19’, *Kepemimpinan Indonesia*, 2, pp. 1–8.
- Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suni, N. S. P. (2020) ‘Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona’, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, XII(3), pp. 14–18. Available at: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-3-I-P3DI-Februari-2020-1957.pdf.
- Vernanda, R. and Negar, L. A. (2019) ‘Kesiapan Indonesia Menuju Agile Governance’, pp. 1–6.
- Wicaksono, B. D. (2020) ‘The Influence of Pikobar Application in Suppressing the Rate of Coronavirus Spread The Influence of Pikobar Application in Suppressing the Rate of Coronavirus Spread’. doi: 10.1088/1742-6596/1641/1/012035.
- Winarno, B. (2016) *Kebijakan Publik Era Globalisasi, Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: Buku Seru.
- World Health Organization* (2021). Available at: <https://covid19.who.int/>.